

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara menginginkan pemerintahan yang dapat berupaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *good governance*. Indonesia sendiri selalu berupaya menjalankan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahannya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Lamangida, 2018). Berlakunya otonomi daerah di Indonesia merupakan cara menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*). Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk berbenah meningkatkan kapabilitas dan efisiensi dalam menjalankan pemerintahan. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan pemerintah daerah saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola keuangannya mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi dan pertanggungjawabannya, termasuk didalamnya pengamanan atas asset pemerintah daerah yang dibiayai dengan anggaran pemerintah secara efektif dan efisien (Abdul Halim, 2014:271).

Dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah mengharuskan agar semua keuangan daerah diatur secara tertib, transparan, ekonomis, bertanggungjawab, taat pada peraturan yang berlaku, efektif dan efisien (Trisnawati dan Wiratmaja, 2018). Prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik akan mempengaruhi kinerja pemerintah yang menyajikan atau yang membuat laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud

pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Bastian, 2010:336).

Pemerintah daerah diwajibkan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai laporan mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Salah satu yang menjadi indikator untuk mengetahui kejujuran dan kinerja pemerintah daerah adalah melalui laporan keuangannya (Darma, 2019). Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan (Bastian, 2010:9). Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah haruslah berguna yaitu dapat memberikan dukungan dalam hal pengambilan keputusan serta dapat meningkatkan pemahaman oleh para pengguna laporan keuangan. Salah satu pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kepentingan dengan LKPD dikarenakan pemerintah pusat telah menyerahkan sumber daya keuangan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah (Kurniawan, 2012:18).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang baik tentunya akan meningkatkan kualitas daerah tersebut (Majid, dkk. 2019). Komponen LKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Erlina, dkk. 2013:23).

Pemerintah daerah juga dituntut untuk menyajikan LKPD yang berkualitas agar dapat berguna bagi penggunanya. LKPD yang berkualitas merupakan tujuan

dari organisasi sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan daerah telah berjalan dengan baik atau belum, sehingga pemerintah daerah diharuskan untuk dapat menghasilkan LKPD yang berkualitas. Di mana LKPD yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari: 1) relevan; 2) andal; 3) dapat dibandingkan; dan 4) dapat dipahami (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2014).

LKPD dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalam LKPD tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna LKPD. Dengan adanya informasi dari laporan keuangan ini juga diharapkan dapat memberi prediksi di masa yang akan datang dan dapat mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini. Informasi yang terkandung dalam LKPD haruslah disajikan tepat waktu sehingga dapat berguna bagi pengambilan keputusan dan informasi yang disajikan harus lengkap dan terperinci. LKPD dikatakan andal apabila informasi dalam LKPD harus bebas dari kesalahan material, menyajikan setiap informasi secara jujur dan dapat diverifikasi. Informasi pada LKPD yang disajikan harus diarahkan pada kepentingan umum dan tidak berpihak kepada pihak tertentu. LKPD dapat dikatakan dapat dibandingkan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan LKPD periode sebelumnya. LKPD dikatakan dapat dipahami jika informasi yang terdapat dalam LKPD bermanfaat jika dapat dipahami oleh semua pihak yang menggunakan atau memerlukan LKPD (Erlina, dkk. 2013:8).

LKPD yang berkualitas dapat tercermin dari opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Bastian 2010:337). Hasil audit berupa opini dari BPK yang merupakan strata tertinggi adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kemudian selanjutnya adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) (Darma:2019). Perkembangan opini BPK terhadap LKPD berdasarkan Tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kota dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019 Berdasarkan Tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Pemerintahan Tahun	Kabupaten					Kota				
	WTP	WDP	TMP	TW	Jumlah	WTP	WDP	TMP	TW	Jumlah
2015	224	158	29	4	415	60	31	2	0	93
	54%	38%	7%	1%	100%	65%	33%	2%	0%	100%
2016	274	120	21	0	415	72	20	1	0	93
	66%	29%	5%	0%	100%	77%	22%	1%	0%	100%
2017	298	100	17	0	415	80	13	0	0	93
	72%	24%	4%	0%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	327	76	12	0	415	84	8	1	0	93
	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	364	44	6	0	414	87	6	0	0	93
	88%	10,6%	1%	0%	99,6%	94%	6%	0%	0%	100%

Sumber: IHPS I 2016 sampai dengan IHPS I 2020 BPK RI

Dilihat dari tabel diatas dalam waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), opini LKPD Tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kota mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD Kabupaten yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 34 poin persen, yaitu dari 54% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 88% pada LKPD Tahun 2019. Sedangkan LKPD Kota yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 27 poin persen, yaitu dari 65% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 94% pada LKPD

Tahun 2019. Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019 (IHPS I Tahun 2020 BPK RI, 2020).

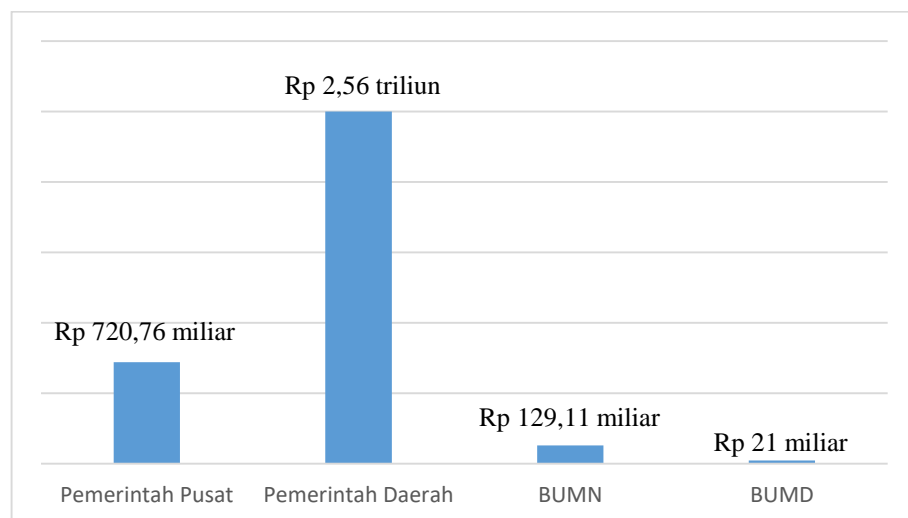
Fenomena yang terjadi terkait Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dalam sambutannya pada Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, beliau mengatakan perangkat daerah yang memperoleh opini WTP tidak berarti LKPD bebas dari kesalahan. Ketua BPK mengungkapkan, BPK masih menemukan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Kelemahan SPI tersebut antara lain kelemahan perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup per pemda, sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, serta sistem informasi akuntansi, tidak terdapat aktivitas yang efektif dalam pengelolaan dana, sehingga terjadi penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang tidak sesuai ketentuan.

Selain itu BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan. Temuan tersebut salah satunya masih banyak pemerintah daerah yang belum tertib dalam menatausahakan Aset Tetap (www.bpk.go.id, 2020).

- 2) Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2019 mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan SPI yang masalahnya terdiri atas 1.729 (33%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta 2.338 (45%) permasalahan kelemahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, lalu terdapat 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial sebesar Rp1,52 triliun (IHPS I Tahun 2020 BPK RI, 2020).
- 3) Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD selama periode 2005-30 Juni 2020 dalam IHPS I Tahun 2020 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-30 Juni 2020 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan selama periode 2005-30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3,43 triliun. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,56 triliun (74%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian

negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2020 sebesar Rp3,43 triliun (IHPS I Tahun 2020 BPK RI, 2020). Hasil pemantauan penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan disajikan dalam gambar 1.1 berikut ini:



Sumber: IHPS I Tahun 2020 BPK RI (2020)

Gambar 1.1 Grafik Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Periode 2005-30 Juni 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran.

Berdasarkan Gambar 1.1, kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,56 triliun (74%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2020 sebesar Rp3,43 triliun (IHPS I Tahun 2020 BPK RI, 2020).

Tabel 1.2
Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten
Provinsi Jawa Barat.

Entitas Pemkab	Opini Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kab. Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS I Tahun 2016 sampai IHPS I Tahun 2020 BPK RI (2020)

Berdasarkan tabel 1.2 Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan pada LKPD Tahun 2019 dengan meraih opini WTP setelah empat tahun terakhir tidak mengalami peningkatan opini. Walaupun sudah meraih opini WTP bukan berarti LKPD telah terbebas dari kesalahan sebagaimana dikatakan oleh Ketua BPK RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kabupaten Bandung Barat (KBB) IHPS I Tahun 2020 atas LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019 ditemukan beberapa permasalahan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang didalamnya terdapat permasalahan aset tetap yang menjadi masalah dari tahun ke tahun pada Kabupaten Bandung Barat (LHP KBB BPK RI, 2020). Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Aset Tetap pada LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019 dan penelusuran data aset dalam aplikasi Atisisbada diketahui masih terdapat permasalahan penyajian Aset Tetap dengan uraian sebagai berikut (LHP KBB BPK RI, 2020):

- 1) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum melakukan kodifikasi Barang Milik Daerah (BMD) seperti yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

2) Pelaksanaan sertifikasi Aset Tanah belum optimal

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Kasubid Pengamanan masih terdapat 1.680 dari 1.735 bidang tanah yang belum bersertifikat dalam Aset Tetap Tanah dengan luas tanah 6.136.513,41 m².

3) Penyajian Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada 11 OPD belum informatif.

4) Pencatatan Gedung Masjid Agung Kabupaten Bandung Barat belum sesuai dengan Nilai Perolehan.

5) Penyajian Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan yang berasal dari Kementerian PUPR belum didukung dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Pemerintah Daerah.

6) Perbedaan Data Irigasi Kabupaten antara Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan SK Irigasi.

7) Data Aset Tetap Lainnya pada Aset Tetap Lainnya belum dilakukan Inventarisasi secara periodik.

Selain itu terdapat permasalahan terkait Kualitas LKPD Kabupaten Bandung Barat TA 2019 yaitu kesalahan penganggaran Belanja Modal Aset Tetap Renovasi pada 9 OPD. Berdasarkan hasil penjelasan dari Bidang Aset BPKD diketahui bahwa penganggaran belanja modal Aset Tetap Renovasi tersebut disebabkan kesalahan penafsiran dalam penyusunan anggaran. Nomenklatur pemeliharaan gedung disamakan dengan renovasi. Untuk pencatatan penambahan belanja modal Aset Tetap Lainnya Renovasi tersebut telah dikapitalisasi ke aset induknya dalam Aset Tetap Gedung dan Bangunan masing-masing OPD. Hal

tersebut tidak sesuai dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait Kerangka Konseptual Akuntansi dan Pernyataan nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas (LHP KBB BPK RI, 2020).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2019, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). terdapat empat unsur penilaian yang mendapat perhatian pemkab, meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal (IHPS I Tahun 2020 BPK RI, 2020). Salah satu indikator atas Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang baik adalah keterandalan laporan keuangan. Keterandalan pelaporan keuangan, menjaga kekayaan dan pencapaian organisasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan (Reydonnyzar, dkk. 2020:31).

Dari fenomena yang telah dipaparkan di atas masih terdapat perincian akun asset yang disajikan oleh Pemkab Bandung Barat tidak sesuai dengan SAP. Hal yang mendasar dan penting dalam penyusunan LKPD adalah pemahaman akan standar yang diterapkan. Dalam PP no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintah, pemerintah untuk dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah sebagai landasan dalam

menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dalam rangka menciptakan pemerintah yang baik (Reydonnyzar, dkk. 2020:43).

Selain itu pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan, diperlukan adanya sebuah sistem akuntansi yang baku yang diterapkan secara konsisten sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan tersebut dapat disajikan secara lengkap dan tepat waktu (Erlina, dkk. 20013:67). Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik (Mardiasmo, 2018:184).

Terdapat kelemahan dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak disertai bukti yang cukup (IHPS I Tahun 2020 BPK RI, 2020). Hal tersebut menjelaskan dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan (Erlina, dkk. 2013:186).

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya dilakukan oleh Sihombing (2011) juga melakukan suatu penelitian yang membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian berikutnya Roviyantje (2011) yang membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dari hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa jika Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) semakin baik maka akan menyebabkan semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian berikutnya Darma (2019) juga melakukan suatu penelitian yang membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menjadi faktor penting dalam menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. Di mana apabila Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah terpenuhi maka pemerintahan yang baik akan dapat tercapai dengan kata lain *good governance* dapat diwujudkan. Atas dasar tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Ketua BPK RI mengatakan perangkat daerah yang memperoleh opini WTP tidak berarti LKPD bebas dari kesalahan. kelemahan perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup per pemda, sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, entitas terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai, serta sistem informasi akuntansi, tidak terdapat aktivitas yang efektif dalam pengelolaan dana, sehingga terjadi penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang tidak sesuai ketentuan.
2. Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2019 mengungkapkan 6.160 temuan yang memuat 10.499 permasalahan yang terdiri atas 5.175 permasalahan SPI yang masalahnya terdiri atas 1.729 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan serta 2.338 permasalahan kelemahan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, lalu terdapat 5.324 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak finansial sebesar Rp1,52 triliun.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan kerugian negara/daerah yang terjadi pada pemerintah daerah sebesar Rp2,56 triliun (74%) merupakan nilai yang terbesar dari total kerugian negara/daerah dengan status telah ditetapkan periode 2005-30 Juni 2020 sebesar Rp3,43 triliun
4. Dilihat dalam waktu 5 tahun terakhir (2015-2019), opini LKPD Tingkat Pemerintahan Kabupaten dan Kota mengalami perbaikan. Namun masih ada juga Pemkab maupun Pemkot yang meraih opini selain WTP.

5. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Aset Tetap pada LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2019 dan penelusuran data aset dalam aplikasi Atisisbada diketahui masih terdapat permasalahan penyajian Aset Tetap yang berpengaruh keandalan laporan keuangan.
6. Masih terdapat perincian akun asset yang disajikan oleh Pemkab Bandung Barat tidak sesuai dengan SAP.
7. Masih terdapat kelemahan dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak disertai bukti yang cukup.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dalam mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan rumusan masalah dan maksud yang telah dikemukakan di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.5 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian yang diterapkan dapat dihasilkan dari penelitian ini diantaranya:

1.5.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat, penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan manfaat serta masukan yang berguna sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Bagi Bendahara dan Bagian Akuntansi diharapkan menjadi bahan masukan dalam mengevaluasi suatu administrasi keuangan yang baik dalam mewujudkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Serta penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan saran-saran serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam

meningkatkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di waktu yang akan datang sehingga menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Selanjutnya kegunaan akademis yang diharapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman penulis tentang Akuntansi Sektor Publik terkhusus mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.